

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karna daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki hak penuh dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dan

juga untuk kepentingan masyarakat luas. Pengaturan pengeluaran dana tidak lagi tergantung pemerintah pusat, pengaturan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan penyusunan anggaran daerah, menggunakan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerah yang dimiliki, serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi dan potensi daerahnya masing-masing, supaya pemerintah daerah bisa benar-benar mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, pelimpahan wewenang tersebut juga bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*), yang memiliki beberapa karakteristik, antara lain: transparansi, akuntabilitas publik, efisien dan efektif. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia maka perencanaan pembangunan harus direncanakan dengan baik. Pembangunan akan berjalan baik apabila rencana penganggaran dilakukan dengan cermat dan dikelola dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya

pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Machmud dkk (2014:5) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam APBD, yang meliputi anggaran dan realisasinya. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dikatakan buruk.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan. (Puspitasari, 2013:6)

Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Salah satu cara untuk

menganalisa kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Mahmudi (2016:135) untuk mengukur kinerja, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, dengan menghitung rasio keuangan yang meliputi: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya memiliki potensi PAD yang cukup besar karena Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri dan pendidikan. Dan dengan adanya sistem desentralisasi, Kota Surabaya harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Atas dasar uraian latar belakang penelitian diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika diukur dengan menggunakan rasio efektivitas?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika diukur dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika diukur dengan menggunakan rasio keserasian?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika diukur dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya jika diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas.
2. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah.
3. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dengan menggunakan rasio keserasian.
4. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal.
5. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik. Dan sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan analisis kinerja keuangan. Dan bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama berada di bangku kuliah

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau masyarakat yang membutuhkan.

1.5 Fokus penelitian dan keterbatasan

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio

keserasian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Apabila ada informasi lain diluar focus penelitian maka peneliti jadikan sebagai data pendukung. Untuk membatasi masalah agar tidak melebar dari focus penelitian. Maka tempat, pelaku dan aktivitas menyesuaikan dengan waktu penelitian yang telah ditentukan sehingga jika terjadi fenomena dan peristiwa yang mendukung tetapi tidak diikut sertakan dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.

